

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pembangunan sosial di negara berkembang tidak selalu mengalami kegagalan karena faktor-faktor internal. Namun juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti bantuan luar negeri yang sepatutnya dapat mendorong tercapainya target-target pembangunan yang telah dirumuskan. Dalam ranah hubungan internasional, bantuan luar negeri dan pembangunan merupakan dua variabel yang saling berkaitan. Bantuan luar negeri yang disalurkan secara strategis dapat menguntungkan negara yang membawahi suatu lembaga donor atas kepentingannya di suatu negara penerima bantuan. Sedangkan bagi pembangunan di suatu negara berkembang yang sering mengalami kendala anggaran, bantuan luar negeri menjadi instrumen pembantu yang krusial guna mengimplementasikan sebuah program pembangunan tersebut. Terlebih lagi kini negara-negara berkembang tengah berambisi menggapai *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2020, sehingga banyak mega proyek pembangunan yang dirumuskan pada abad 21 ini.

Ethiopia adalah salah satu contoh negara kurang berkembang yang baru naik kelas menjadi negara berkembang dan berambisi menggapai MDGs melalui program pembangunan lima tahunannya yang disebut

Growth Transformation Plan (GTP) 2010-2014. GTP yang menargetkan tercapainya pembangunan sosial-ekonomi ini merumuskan program utama yang disebut dengan *Villagization*. Dengan adanya program *Villagization* ini, pemerintah Ethiopia menargetkan relokasi 1,5 juta penduduk dari pemukiman tersebar ke dalam pemukiman terpusat yang disertai dengan fasilitas dan infrastruktur sosial ekonomi sebagai penunjangnya.

Bantuan luar negeri selalu menjadi instrumen penting atas keberlangsungan program pembangunan di Ethiopia, dimana 50 % sampai 60% anggaran belanja negara didominasi oleh bantuan luar negeri pada tahun 2010. *United States Agency for International Development (USAID)* adalah salah satu lembaga donor yang memberikan bantuan terbesar di Ethiopia. Masuknya paket-paket bantuan USAID seperti *Feed the Future* dan *Ethiopia Land Tenure and Administration Program (ELAP)* kemudian diejawantahkan pemerintah Ethiopia ke dalam program pembangunan seperti *Villagization* ini.

Program ini diimplementasikan di empat provinsi (Gambella, Afar, Somali, dan Benishangul-Gumuz) dan kemudian satu provinsi (SNNPR) menyusul di tengah-tengah berjalannya program. Selama program berjalan empat tahun, program *Villagization* menuai berbagai pertentangan dari penduduk yang direlokasi. Pertentangan itu berlangsung selama sosialisasi program, proses relokasi, bahkan hingga program selesai pada tahun 2014. Selama sosialisasi, pertentangan dari penduduk banyak dijawab oleh pemerintah Ethiopia dengan cara-cara intimidasi dan koersif. Sehingga

kemudian banyak penduduk yang direlokasi dengan paksa, padahal program ini dinyatakan sebagai program sukarela.

Proses relokasi jelas tidak dilakukan secara sukarela. Banyak penduduk yang ingin menunda direlokasi karena periode relokasi bertepatan dengan musim panen, namun aspirasi ini tidak diperhatikan oleh pemerintah dan justru dijawab dengan reaksi-reaksi kekerasan. Selain karena musim panen, alasan penduduk enggan direlokasi juga karena lahan baru yang akan diolah untuk pertanian tidak selayak lahan yang dimiliki penduduk sebelumnya atau bahkan belum dibuka oleh pemerintah. Selain itu, setelah penduduk dipindah ke pemukiman baru, banyak penduduk yang berupaya kembali ke pemukiman lamanya karena pemerintah mengabaikan komitmen pembangunannya untuk menyediakan fasilitas dan membangun infrastruktur penunjangnya. Setiap bentuk perbedaan pendapat atau aksi penolakan masyarakat selalu dijawab aparat dengan tindak kekerasan seperti pemukulan hingga tindak kekerasan seksual bagi penduduk perempuan. Sehingga banyak penduduk yang lari mengungsi ke Kenya atau bahkan meninggal karena kekejaman aparat.

Penyelenggaraan program *Villagization* yang disertai dengan pemaksaan, pemenjaraan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan hingga pengingkaran fasilitas dan infrastruktur di pemukiman baru menunjukkan betapa lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah Ethiopia. Pemerintah nampak tidak mampu menjalankan kebijakan yang telah dirancang dalam program pembangunannya. Misalnya seperti

menyediakan rumah yang layak, lahan pertanian, saluran irigasi, pabrik penggilingan, gudang penyimpanan, dan bahkan klinik kesehatan serta sekolah pun tidak disediakan sesuai komitmen.

Perumusan kebijakan yang serampangan dapat dilihat dari pengumpulan penduduk ke pemukiman baru tanpa melihat latar belakang penduduk, waktu relokasi, hingga lokasi pemukiman baru yang kurang memadai. Penduduk yang ditargetkan direlokasi memiliki latar belakang yang berbeda dari yang bertani di lahan basah, ladang berpindah, hingga praktik agro-pastoral, namun secara serampangan pemerintah Ethiopia menempatkan mereka pemukiman terpusat yang sama. Padahal kebutuhan setiap penduduk berbeda-beda. Bahkan lokasi pemukiman baru itu jauh dari sumber air dan kurang layak untuk ditanami karena terlalu gersang. Selain perumusan kebijakan, kelemahan kapasitas kelembagaan dapat dilihat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia selama pelaksanaan program *Villagization*. Pelanggaran hukum meliputi pelanggaran hak kemanusiaan yang tertulis dalam Pasal 18 ayat 1, hak menentukan nasib sendiri yang tertulis dalam Pasal 39 ayat 1, hak ekonomi sosial dan budaya yang tertulis dalam Pasal 41, hingga pasal 44 yang mengatur tentang kompensasi untuk penduduk yang terkena dampak program-program pemerintah.

Selain karena kelemahan kapasitas kelembagaan pemerintah Ethiopia, sekuritisasi yang dilakukan USAID dalam bantuan luar negeri juga sangat mempengaruhi atas apa yang terjadi selama berlangsungnya

program *Villagization*. Dengan adanya sekuritisasi dalam bantuan luar negeri USAID, terjadi pengabaian terhadap penyelenggaraan program *Villagization* yang intimidatif, koersif, dan ingkar pada komitmen-komitmen pembangunan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur penunjang di pemukiman-pemukiman baru. Padahal dalam dokumen evaluasi *Pastoral Livelihoods Initiative Phase II* (PLI II) telah dilaporkan adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan relokasi jauh dari kesukarelaan penduduk. Namun semua itu tetap diabaikan oleh USAID karena lembaga donor terbesar di Ethiopia ini lebih berfokus pada isu-isu keamanan, dimana memukimkan penduduk secara terpusat akan mempermudah pemerintah untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penduduknya sehingga membawa dampak langsung terhadap penanganan aktivitas terorisme di Ethiopia.

Kegagalan program *Villagization* dapat dilihat melalui lima indikator pembangunan yang telah disepakati oleh USAID dan Pemerintah Ethiopia dalam *Country Development Cooperation Strategy 2010/2011 – 2014/2015*. Pertama adalah tidak meningkatnya kemampuan agrikultur secara menyeluruh, dimana meningkatnya kemampuan agrikultur ini hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak pada aspek ketahanan pangan. Kedua adalah tidak terciptanya peluang transisi mata pencaharian penduduk. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi di pemukiman baru yang belum seluruhnya dipenuhi pemerintah Ethiopia. Aspek ketiga terkait peningkatan daya saing sektor

privat ini sebenarnya berhasil dimana lahan-lahan kosong yang ditinggalkan oleh penduduk secara cepat telah dialih-fungsikan untuk industri pertanian dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Namun penduduk yang direlokasi tidak sampai mendapatkan manfaatnya, justru penduduk dirugikan karena lahannya telah diambil-alih tanpa kompensasi yang layak. Keempat adalah tidak meningkatnya ketahanan dan perlindungan terhadap bencana. Ketahanan dan perlindungan ini baru dapat dijalankan setelah penduduk bermukim secara terpusat di pemukiman baru, dimana USAID dan pemerintah akan mengintegrasikan pendekatan tanggap bencana ke penduduk. Tetapi sosialisasi maupun pelatihan itu tidak berlangsung di beberapa pemukiman baru karena beberapa pemukiman baru tersebut telah ditinggalkan penduduk. Kelima adalah tidak meningkatnya status kesehatan serta gizi pada perempuan dan anak-anak. Kegagalan ini tidak lain disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah menyediakan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di pemukiman baru.

Dari kegagalan tersebut, penduduk Ethiopia kini belum dapat terlepas dari masalah kemiskinan. Pengabaian USAID benar-benar mengakibatkan tujuan transformasi sosial-ekonomi gagal tercapai. Walau Ethiopia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kemiskinan masih terus meningkat drastis, dimana sampai tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Ethiopia terus bertambah mencapai 30 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini menunjukkan bahwa distribusi

ekonomi ini tidak merata, dimana masih terjadi kesenjangan pendapatan diantara penduduk. Bahkan yang terjadi tidak hanya kesenjangan ekonomi melainkan juga kesenjangan sosial yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap penduduk dengan gender atau etnis tertentu dalam mengakses fasilitas publik seperti pendidikan, medis, birokrasi, hingga ketenagakerjaan.

Pasca *Villagization*, gelombang protes terhadap tindakan-tindakan perampasan lahan oleh pemerintah Ethiopia beserta investor terus meningkat. Bahkan pada bulan November 2015, sekitar 140 penduduk tewas dibunuh aparat karena melakukan demonstrasi di ibukota Addis Ababa. Hingga saat ini konflik sosial di Ethiopia terus terjadi dan menyebabkan stabilitas keamanan di Ethiopia semakin menurun. Selain konflik sosial, angka kriminalitas juga meningkat. Hal ini dipicu oleh semakin merenggangnya kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Diskriminasi terhadap etnis dan gender, bahkan diskriminasi terhadap penduduk yang tidak memilih partai politik penguasa (EPRDF) sangat mempengaruhi kehidupan penduduk di Ethiopia.

Berbagai fakta-fakta di atas cukup untuk menunjukkan bahwa pembangunan sosial di Ethiopia gagal dicapai. Program pembangunan yang didanai lembaga donor pembangunan semacam USAID sepatutnya dapat memperlancar berjalannya proses pembangunan di Ethiopia. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dimana penduduk tidak dapat merasakan transformasi sosial-ekonomi ke arah yang lebih baik. Kemiskinan dan

kesenjangan sosial masih terus terjadi pada penduduk Ethiopia umumnya, dan khususnya bagi penduduk yang terdampak program *Villagization* secara langsung masih terjat dalam kemiskinan dan kelaparan. Bahkan tidak jarang juga menyebabkan penduduk mengungsi ke kamp UNHCR di Kenya untuk mencari perlindungan.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam menyediakan sumber data terkait keberlangsungan program *Villagization* di seluruh distrik yang ditargetkan untuk relokasi. Penulis juga menyadari adanya perbedaan perspektif dalam melihat indikator kesuksesan pembangunan di suatu negara. Penulis hanya melihat bahwa proses pembangun – di suatu negara berkembang – yang mendapat dukungan dan bantuan besar dari lembaga bantuan pembangunan sepatutnya dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata pada masyarakat miskin. Sehingga dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh penguasa dan pemilik modal di negara berkembang tersebut. Walau penelitian ini tidak cukup terstruktur, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi motivasi bersama, dan khususnya bagi para pelaku pembangunan untuk dapat menyelenggarakan pembangunan yang menyejahterakan semua pihak dan membawa pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan bersama di masa sekarang dan masa mendatang.